

Nilai Pancasila Terus Berkembang Demi Kesejahteraan



KR-Rahajeng Pramesi

Penyerahan plakat cinderamata dari Forum BEM DIY kepada HM Idham Samawi.

SLEMAN (KR) - Ideologi Indonesia adalah Pancasila. Untuk ideologi, Pancasila merupakan harga mati. Meski demikian nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

"Ideologi Pancasila banyak yang ingin mengganti dengan ideologi lain. Saya akan berada di barisan paling depan untuk melawan," tegas anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Drs HM Idham Samawi di sela

Pelantikan Forum Badan Eksekutif Mahasiswa DIY (FBD) dan Seminar Kebangsaan "Sosialisasi MPR RI, Penguatan Tentang Nilai Kebangsaan dan Bernegara" di Hotel Merapi Merbabu, Minggu (11/4).

Ditegaskan Idham, nilai-nilai dalam Pancasila harus terus dikikinkan demi kesejahteraan bersama sesuai dengan zamannya. Adapun ukuran kesejahteraan dari tahun ke tahun selalu berbeda dan

ini yang harus dikikinkan.

"Sebagai calon pemimpin bangsa, mahasiswa harus mengetahui sejarah bahwa kakek moyang bangsa Indonesia pernah mewarnai peradaban dunia yakni Sriwijaya dan Majapahit. Bangsa Indonesia memiliki jiwa agresif dan pekerja keras sehingga disegani banyak bangsa lain. Selain itu Indonesia dibangun dengan keberagaman yakni 700 suku bangsa, 1.000 budaya dan 1.000 bahasa," kata Idham.

Koordinator Umum Forum BEM DIY Yudha Laksono menambahkan, sebelum pelantikan kepengurusan Forum BEM DIY diadakan Mubes pada Maret kemarin. "Forum BEM DIY (FBD) menjadi momen rekonsiliasi menyatukan kembali kembali yang tergabung dalam FBD. Sebelumnya ada 60 kampus. Kami akan menyusun arah gerakan baru dalam FBD," jelasnya.

(Aje)-f

DIMUNGKINKAN BANYAK ZONA MERAH DAN ORANYE Ketentuan Zonasi RT di Sleman Diubah

SLEMAN (KR) - Perpanjangan PPKM berbasis mikro telah ditetapkan dengan diterbitkannya Instruksi Bupati No.8/ 2021. Pelaksanaan PPKM Mikro hingga 19 April ini akan mengubah ketentuan zonasi RT dengan segala konsekuensinya.

Kepala Dinas Kesehatan Sleman dr Joko Hastaryo mengatakan, dengan Instruksi Bupati terbaru tersebut sangat dimungkinkan banyak RT yang masuk zona merah dan oranye. "Kalau suatu RT masuk zona merah dan oranye, maka tempat ibadah dan taman bermain anak tidak boleh dibuka. Saat ini kami sedang mengkaji pembaruan peta zonasi epidemiologi Covid-19. Penerbitan zonasi RT terbaru akan kami berikan sebelum puasa," ungkapnya, kemarin.

Lebih jauh dijelaskan, Instruksi Bupati no 8/2021 mengatakan pada perpanjangan PPKM Mikro saat ini sebuah RT dinyatakan masuk zona merah jika terjadi lebih dari lima rumah dalam satu RT warga yang positif Covid-19 dalam sepekan terakhir. Kalau itu terjadi, maka ketentuan yang dilakukan adalah dengan menemukan suspek dan pelacakan kontak erat.

Selain itu, seluruh suspek melakukan isolasi dengan pengawasan ketat dan melara-

kerumunan warga lebih dari tiga orang serta membatasi jam keluar masuk warga hingga pukul 20.00 WIB. "Rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat lainnya kecuali sektor esensial ditutup. Tidak ada kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT," bebernya.

Adapun ketentuan baru untuk RT zona oranye, lanjut Joko, jika terdapat tiga sampai lima rumah dalam satu RT yang terkonfirmasi positif. Maka skenario pengendaliannya dengan menemukan suspek, isolasi mandiri bagi pasien dan kontak erat dengan pengawasan ketat. Selain itu, rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat lainnya kecuali sektor esensial ditutup.

"Untuk RT zona kuning, jika terdapat satu hingga dua rumah yang terkonfirmasi positif dalam satu RT. Pengendaliannya dilakukan dengan melacak suspek dan kontak erat kemudian melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat. Sedangkan yang disebut RT zona hijau kalau tidak ada kasus warga yang positif Covid-19 dalam satu RT," katanya.

Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan sebelumnya di mana RT masuk zona merah jika pasien Covid-19 terjadi di lebih dari 10 rumah dalam satu RT. Zona oranye ditetapkan ketika ada 6-10 rumah positif Covid-19 dan RT dinyatakan zona kuning ketika ada 1-5 rumah memiliki positif Covid-19. (Has)-f

MUSCAB DAN MUSRAN SE-SLEMAN PAN Sasar Generasi Z



KR-Istimewa

Pengurus DPD dan DPW PAN dalam acara muscab dan musran.

SLEMAN (KR) - DPD PAN Kabupaten Sleman menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) dan Musyawarah Ranting (Musran) ke V DPC dan DPRt se-Kabupaten Sleman, Minggu (11/4). PAN Sleman dalam Pileg 2024 menargetkan 9 kursi dengan menyasar generasi Z dan kaum milenial.

Ketua DPD PAN Sleman Raudi Akmal menjelaskan, kegiatan musya-

warah perlu segera dilakukan untuk menata kembali struktur organisasi. Dengan struktur yang tertata serta pembagian tugas yang merata, akan memudahkan partai dalam bergerak menjangkau suara.

"Tema musyawarah ini 'Struktur kuat, PAN menang' bertujuan agar tahapan politik serentak tahun 2024 bisa segera kita kerjakan sejak dini.

Tantangan ke depan adalah bonus demografi generasi Z dan generasi milenial yang akan mempunyai hak suara pada pemilu mendatang," jelas Raudi di Puri Mataram. Acara tersebut dihadiri Bupati Kustini, Ketua MPP DPD PAN Sleman Sri Purnomo, anggota DPRD Fraksi PAN Sleman dan Provinsi DIY dan Sekretaris Bidang POK DPP Slamet Nur Achmad Effendy.

Ketua DPW PAN DIY Suharwanta menambahkan, kader PAN bisa lebih solid dan kreatif. Selain itu kader PAN harus mampu beradaptasi dengan cepat. Tak hanya pada strategi politik, namun juga perkembangan teknologi.

"Perkembangan ini bisa berarti dua hal. Positif jika kita bisa beradaptasi dengan cepat. Atau bisa tertinggal dan itu dampak negatif," ujarnya. (Sni)-f

Polres Buka Layanan Publik Terpadu

SLEMAN (KR) - Polres Sleman kini memiliki ruang pelayanan publik terpadu, yang terintegrasi dengan 7 fungsi kepolisian. Inovasi tersebut, diharapkan bisa memotong rantai birokrasi sehingga mewujudkan pelayanan prima.

Waka Polres Sleman Kompol M Kasim Akbar Bantilan SIK MM menyampaikan, inovasi itu diberikan untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian di bidang apapun. Harapannya, ruang pelayanan yang terintegrasi ini bisa memotong rantai birokrasi.

"Dengan adanya ruang pelayanan terpadu ini, diharapkan pelayanan pu-



KR- Dok Humas Polres Sleman

Ruang layanan terpadu yang terintegrasi dengan 7 fungsi kepolisian.

blik di Polres Sleman bisa memenuhi prinsip-prinsip pelayanan prima yaitu sederhana, jelas, akurasi, efektif dan efisien serta kenyamanan pelayanan,"

jelasnya, Minggu (11/4).

Pelayanan pengaduan terpadu, memberikan layanan yang terintegrasi dengan 7 fungsi Kepolisian yakni Satuan Sabhara,

Satlantas, Satreskrim, Satuan Narkoba, Satuan Intelkam, Propam dan Seksi Pengawasan. Masyarakat yang datang ke Polres Sleman dan memerlukan penanganan petugas, apapun permasalahannya akan langsung dilayani di ruang pelayanan terpadu. Baik tindak pidana maupun laporan lainnya seperti pohon tumbang, orang hilang, kehilangan barang, laka lantas, penyalahgunaan obat-obatan atau pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan kepolisian. "Masyarakat juga bisa menghubungi nomor pelayanan publik dengan nomor WhatsApp 087746972000 dan telepon 0274110," pungkasnya. (Ayu)-f

GOLKAR DIY BANGKIT



KR-Devid Permana

Drs HM Gandung Pardiman MM memberikan pembekalan kepada calon PK.



KR-Devid Permana

Tim dari Partai Golkar DIY turut memantau jalannya fit and proper test.

KONSOLIDASI TOTAL ORGANISASI

Partai Golkar Sleman Adakan 'Fit and Proper Test' Calon PK

SLEMAN (KR) - DPD Partai Golkar Kabupaten Sleman mengadakan uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) bagi calon Pimpinan Kecamatan/Kapanewon (PK) Partai Golkar se-Kabupaten Sleman di Grand Sarila Hotel, Jalan Affandi Depok Sleman, Minggu (11/4). Fit & proper test ini merupakan kelanjutan dari tahap penjurangan calon PK yang telah dilakukan di tingkat kapanewon.

Ketua DPD Partai Golkar DIY Drs HM Gandung Pardiman MM yang memantau langsung jalannya kegiatan mengatakan, fit and proper test dimaksudkan untuk mendapatkan PK Partai Golkar berkualitas yang mampu menjalankan roda organisasi secara baik setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Tak hanya itu, melalui fit and proper test diharapkan didapatkan PK yang benar-benar dimau oleh masyarakat (kader partai dan simpatisan).

Menurut Gandung, mekanisme fit and proper test ini akan diterapkan dalam proses

pemilih PK di seluruh kabupaten/kota se-DIY. Mekanisme serupa juga akan diterapkan untuk pemilihan pimpinan partai di tingkat kelurahan. "Partai Golkar terus melakukan konsolidasi total organisasi mulai dari tingkat pusat hingga bawah. Kami menginginkan PK memiliki PDLT (pengabdian, dedikasi, loyalitas, tidak tercela) yang terjamin," ujar politisi senior Partai Golkar yang memiliki slogan Ikhlas Berjuang Ikhlas Beramal Peduli Semuanya itu.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sleman Janu Ismadi menjelaskan, tahapan pemilihan PK diawali dengan proses penjurangan calon PK di tingkat kapanewon yang dihadiri pimpinan partai tingkat kelurahan, ormas pendiri dan didirikan di kapanewon setempat dan tokoh masyarakat dan tokoh Partai Golkar setempat. "Dari proses penjurangan itu diperoleh 3 calon di masing-masing kapanewon yang kemudian diikutkan fit and proper test ini," katanya.

Lebih lanjut dijelaskan Janu, fit and proper test diikuti 51 calon PK dari 17 kapanewon se-Kabupaten Sleman. Fit and proper test terdiri dari ujian tulis yang memiliki bobot terbesar (50%) dengan pertanyaannya seputar kegotkaran, wawasan kebangsaan dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan wawancara yang memiliki bobot (40%), terakhir adalah sikap (10%). "Hasil dari fit and proper test ini berupa nilai dari masing-masing calon," ujarnya.

Hasil atau nilai dari fit and proper test ini akan dilihat oleh DPD Partai Golkar DIY dan DPD Partai Golkar Kabupaten Sleman untuk dibawa ke musyawarah tingkat kapanewon.

Sekretaris DPD Partai Golkar DIY Erwin Nizar menambahkan, merujuk petunjuk teknis (juknis), syarat dicalonkan menjadi PK berusia maksimal 45 tahun dan berpendidikan minimal Sarjana (S1). Namun dimungkinkan calon tidak memenuhi syarat tersebut, jika dipandang punya kualitas mejadi PK dengan persetujuan DPD Partai Golkar DIY. Selain itu calon PK diharuskan memiliki kemandirian, mampu memberi solusi permasalahan yang ada di tengah masyarakat serta memiliki pemahaman soal teknologi informasi (TI) yang memadai. (Dev)



KR-Devid Permana

Para calon PK mengikuti fit and proper test.

DPRD KABUPATEN SLEMAN
SUARA WAKIL RAKYAT
Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274)868413, Fax (0274)868413

Mendulang Pariwisata Melalui Jalan Tol

SLEMAN (KR) - Rencana pemerintah membangun jalan tol yang menghubungkan Solo dan Bawen Jawa Tengah, serta pembangunan Jalan Prambanan Lemahabang perlu disambut positif. Ke depan, keberadaan jalan tol dan Prambanan Lemahabang diharapkan dapat mendulang pariwisata di kawasan Prambanan.

Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari PPP H Ngadiman SAg MSI menjelaskan, dengan nantinya ada jalan tol yang akan masuk ke Yogyakarta, otomatis orang yang akan berkunjung semakin banyak. Tentunya ini akan membawa dampak positif bagi ekonomi di Yogyakarta, khususnya Sleman.

"Mayoritas orang dari luar kota berkunjung ke Sleman ini untuk berpariwisata. Ketika nanti pembangunan jalan tol sudah selesai, tingkat kunjungan akan semakin besar," jelas Ngadiman, Minggu (11/4).

Di samping jalan tol, pemerintah daerah juga berencana membangun jalan Prambanan Lemahabang yang tersambung dengan exit tol Prambanan. Dimana jalan Prambanan Lemahabang ini juga akan menjadi jalur alternatif ke Gunungkidul.

H Ngadiman SAg MSI Anggota DPRD Sleman dari PPP



KR-Saifulah Nur Ichwan

H Ngadiman SAg MSI

Lemahabang ini saya berharap menjadi daya ungkit pariwisata di kawasan Prambanan. Utamanya Candi Ratu Boko, Candi Banyunibo, Candi Ijo, Breksi, dan lainnya," ujar anggota legislatif dari Prambanan ini.

Selain itu, lanjut Ngadiman, jalan Prambanan Lemahabang ini diharapkan juga memunculkan pariwisata baru, khususnya Prambanan atas. Sehingga nanti akan menambah wisata alternatif lagi bagi wisatawan yang berkunjung ke

Prambanan. "Pemandangan alam dari atas itu harus dijadikan peluang membuat destinasi baru. Baik wisata alam atau wisata kuliner," tuturnya.

Menurutnya, jalan tol dan Prambanan Lemahabang juga harus memberikan embrio pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat.

"Kami minta home industri, pelaku kepariwisataan, dan masyarakat lainnya perlu ada pelatihan serta pendampingan. Harapannya mereka bisa menangkap peluang ini untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," terang anggota Komisi A ini. (Sni)-f